

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PERUM BULOG
DALAM STABILISASI HARGA BERAS DI KOTA BATAM
BERDASARKAN PRINSIP HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



TRI LUPITO
NPM : 221.15.00.46

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2026**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PERUM BULOG
DALAM STABILISASI HARGA BERAS DI KOTA BATAM
BERDASARKAN PRINSIP HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan**



Disusun Oleh:

Nama	: Tri Lupito
NPM	: 221.15.00.46
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Perum Bulog Dalam
Stabilisasi Harga Beras di Kota Batam Berdasarkan
Prinsip Hukum Perdata
Nama : Tri Lupito
NPM : 221.15.00.46
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

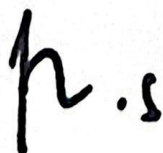
Disetujui,
Komisi Penguji

Ketua



Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.
NIDN: 1021048303

Anggota I



Dr. Indra Sakti, S.H., M.H.
NIDN: 1012068001

Anggota II



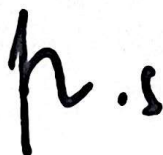
Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDN: 1020088002

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Perum Bulog Dalam
Stabilisasi Harga Beras di Kota Batam Berdasarkan
Prinsip Hukum Perdata
Nama : Tri Lupito
NPM : 221.15.00.46
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui,
Komisi Pembimbing:

Pembimbing I



Dr. Indra Sakti, S.H., M.H.
NIDN: 1012068001

Pembimbing II



Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDN: 1020088002

Diketahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.
NIDN: 1021048303

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Dwi Afni Maileni, S.H., M.H.
NIDN: 1001048501

Tanggal Lulus : Juni 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Lupito
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung, 26 Desember 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 221.15.00.46
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Durian II No 22 Kel. Durian Payung
Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2000 s/d 2006 : SD NEGERI 2 SUKARAME
Tahun 2006 s/d 2009 : SMP PGRI 1 BANDAR LAMPUNG
Tahun 2009 s/d 2012 : SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

MOTTO

**SELAGI KITA MASIH HIDUP DIBAWAH LANGIT MAKA
TIDAK ADA SATU PUN YANG ABADI**

-Tri Lupito -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Perasaan bahagia dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan dan hikmat dari-Nya, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terimakasih saya haturkan kepada Orang tua, Istri dan Anak tercinta yang selama ini selalu mendukung saya hingga dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan lancar, tepat waktu, dan berimbang.

Saya mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen pembimbing dan penguji yang selalu memberikan motivasi, kritik dan solusi terbaik sebagai langkah percepatan dalam penyelesaian penelitian ini. Saya menyadari bahwa setiap bagian dari proses maupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun saya tetap berusaha untuk menyelesaikannya dengan konsep terpadu yang saya rancang sendiri demi percepatan penyelesaian penelitian skripsi ini. Semoga penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih.

Penulis



Tri Lupito

NPM: 221.15.00.46

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Berdasarkan cara penyajian, kelengkapan data dan etika perumusan kalimat di dalam penelitian ini, penulis menyatakan seluruh rangkaian skripsi ini merupakan hasil karya pemikiran penulis sendiri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Perum Bulog Dalam Stabilisasi Harga Beras Di Kota Batam Berdasarkan Prinsip Hukum Perdata”, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis buat adalah benar-benar merupakan dari hasil karya penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi mana pun.

Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang tertulis didalam naskah dan disebutkan didalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan duplikasi serta ada pihak yang merasa dirugikan, maka penulis akan bertanggung jawab serta menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Batam, Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Tri Lupito
NPM. 221.15.00.46

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Perum Bulog Dalam Stabilisasi Harga Beras Di Kota Batam Berdasarkan Prinsip Hukum Perdata”, skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sangat luar biasa bagi seluruh pihak yang selalu memberi masukan dan dukungan. Secara khusus, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam.
2. Ibu Dr. Dwi Afni Maileni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNRIKA Batam sekaligus dosen penguji yang telah memberi kritik serta masukan yang membangun untuk penulis.
3. Ibu Dr. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNRIKA Batam sekaligus sebagai penguji skripsi saya yang telah memberi masukan dan ilmunya.
4. Bapak Dr. Indra Sakti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan kritik, saran dan bimbingan serta arahan yang sangat berguna dengan penulisan penelitian ini.
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan bimbingan tentang bagaimana tata cara penulisan yang benar.

6. Teruntuk para sahabat seperjuangan Fakultas Hukum URIKA angkatan Tahun 2022, terimakasih saya ucapkan kepada kalian untuk ilmu maupun pengalaman selama kita bersama-sama berjuang dalam menggali ilmu semoga kesuksesan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai setiap langkah kita.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam pembahasan materi, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak disertai dengan harapan yang besar, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, Juni 2026

Penulis



Tri Lupito

NPM. 221.15.00.46

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN COVER PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Konseptual	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tinjauan Yuridis.....	17
B. Tinjauan Umum Bulog	18
1. Pengertian Bulog	18
2. Sejarah Bulog	19
3. Visi dan Misi Bulog.....	21
4. Tujuan dan Sasaran Bulog.....	22
5. Tugas dan Peran Bulog	22
C. Tinjauan Umum Stabilisasi Harga	23
D. Tinjauan umum Pengawasan Stabilisasi Harga	24
1. Pengertian Pengawasan	24
2. Fungsi Pengawasan	26
3. Tujuan Pengawasan	26

4. Proses Pengawasan	28
5. Teknik Pelaksanaan Pengawasan	29
E. Tinjauan Umum Harga	31
1. Pengertian Harga	31
2. Peranan Harga.....	32
3. Faktor Yang Mempengaruhi Harga	33
4. Tujuan Penetapan Harga	37
5. Strategi Penetapan Harga	38
F. Tinjauan Umum Beras	40
1. Pengertian Beras	40
2. Jenis – Jenis Beras	41
3. Alur Pengadaan Beras	42
G. Tinjauan Umum Ketahanan Pangan	44
1. Pengertian Ketahanan Pangan.....	44
2. Tujuan Ketahanan Pangan	45
3. Sasaran Ketahanan Pangan	45
4. Faktor yang menentukan Ketahanan Pangan	45
H. Tinjauan Umum Kota Batam	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	51
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Perum Bulog Dalam Stabilisasi Harga Beras Di Kota Batam Berdasarkan Prinsip Hukum Perdata	51
B. Dampak Dari Tidak Adanya Kestabilan Harga Beras Di Pasar Domestik	54
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Indonesia adalah satu dari banyak negara di dunia yang makanan pokoknya berupa nasi sehingga beras menjadi komoditas utama, untuk itu Indonesia mempunyai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan yaitu Perusahaan Umum Bulog atau disingkat Perum Bulog sebagai suatu lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Hal tersebut sesuai dengan tugasnya yang menyangkut harga beras, distribusi beras, dan pengelolaan stok beras untuk menjaga ketahanan pangan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tinjauan yuridis terhadap peran Perum Bulog dalam stabilisasi harga beras di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata dan dampak dari tidak adanya kestabilan harga beras di pasar domestik dengan metode penelitian Yuridis Empiris, dimana penelitian ini berdasarkan pada struktur data yang di lakukan secara metodologis dan sistematis serta penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi lapangan.

Langkah yang akan di lakukan oleh Bulog jika terjadi kenaikan harga yaitu melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Operasi Pasar dengan menggelontorkan beras cadangan pemerintah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, Bulog bekerja sama dengan satgas pangan melakukan penegakan hukum perdata dan pidana terhadap distributor yang menimbun atau menyelewengkan beras, sepanjang tahun 2026 ini dan di tahun-tahun sebelumnya harga beras di Kota Batam masih dapat di katakan cukup aman dan terjangkau walaupun di daerah kepulauan dan terdapat banyak pulau-pulau kecil yang masih sangat sulit untuk di jangkau dalam proses pendistribusiannya.

Dalam penetapan harga beras, Bulog Kantor Cabang Batam sebaiknya dapat meningkatkan koordinasi hingga ke tingkat pusat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar kebijakan harga pangan lebih sesuai dengan kondisi dilapangan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan harga pangan serta melakukan evaluasi berkala.

Kata Kunci : Bulog, Stabilisasi, Harga

ABSTRACT

Indonesia is one of many countries in the world whose staple food is rice, making it a key commodity. Therefore, Indonesia has a state-owned company engaged in food logistics, the State Logistics Agency (Bulog), or Perum Bulog, as its national food agency, which manages rice trade. This is in line with its duties regarding rice pricing, distribution, and stock management to maintain food security.

The problem in this research is a legal review of the role of Perum Bulog in stabilizing rice prices in Batam City based on civil law principles and the impact of the lack of rice price stability in the domestic market using the Empirical Legal research method, where this research is based on data structures that are carried out methodologically and systematically and this research emphasizes the use of secondary data or field studies.

The steps that will be taken by Bulog if there is a price increase are to intervene in the market through the Food Supply and Price Stabilization (SPHP) program and Market Operations by distributing government reserve rice according to the Highest Retail Price (HET). In addition, Bulog is working with the food task force to enforce civil and criminal law against distributors who hoard or misappropriate rice, throughout 2026 and in previous years, rice prices in Batam City can still be said to be quite safe and affordable even though it is in an archipelago area and there are many small islands that are still very difficult to reach in the distribution process.

In determining rice prices, the Batam Branch Office of Bulog should be able to improve coordination down to the central level and collaborate with local governments and related agencies so that food pricing policies are more in line with conditions on the ground and increase public outreach regarding food pricing policies and conduct periodic evaluations.

Keywords: *Bulog, Stabilization, Prices*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lahan pertanian yang cukup luas. Pertanian telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan pertanian tidak pernah kehilangan perannya sebagai andalan bangsa dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Indonesia sendiri disebut sebagai negara agraris dikarenakan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dengan sumber daya alam yang beraneka ragam serta memiliki wilayah yang cukup luas.¹

Negara Indonesia memiliki tanah yang subur karena banyak mendapatkan paparan sinar matahari ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Itulah alasan mengapa di Indonesia banyak warganya yang menjadi petani dengan hasil pertaniannya beragam seperti padi, buah-buahan, sayuran, umbi-umbian dan lain sebagainya.

Negara Indonesia adalah negara yang ketahanan pangannya menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu daerah. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mendukung keberlangsungan hidup.² Perekonomian nasional dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan,

¹ Hilyatin, D. L ''*Pengembangan Ekonomi Islam Lokal Sektor Pertanian Melalui Agrowisata* ''
Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga: Botania Garden
(Bogar) 2020 hal 87

² Rachman, ''*Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Paradigm and Dimensions of Indonesia's Food Security Strategy. In Jejaring Administrasi Publik*''
Jakarta:Pusaka Negara 2021 hal 63

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Langkah penting untuk memastikan kesejahteraan suatu negara adalah menjaga stabilitas pangan. Stabilitas pangan merujuk pada keadaan dimana kebutuhan pangan suatu negara hingga tingkat individu telah terpenuhi dalam beberapa aspek yaitu: jumlah, kualitas, keamanan, kandungan gizi dan pemerataan, serta keterjangkauan. Hal ini berdampak pada masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif.³

Salah satu keunggulan dari sebuah negara dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor dari segi perkembangan ekonominya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia saat ini juga dapat dikategorikan dalam tahap perbaikan dari segi faktor pertumbuhan ekonominya.⁴ Pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu tolak ukur penunjang dari bertumbuhnya sebuah negara, yang kemudian harus dirawat dan ditingkatkan sistem perputarannya agar negara tersebut dapat mempertahankan elektabilitas dari sebuah pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Perekonomian pangan Indonesia merupakan salah satu aspek kunci yang membawa pengaruh stabilitas dalam perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan pangan negara meskipun negara Indonesia dikenal dengan potensi yang besar dalam produksi pangan, namun tantangan dalam ketahanan pangan akan tetap ada selain dari sektor pertanian, sektor swasta juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam ekosistem pangan di Indonesia seperti

³ *Ibid* hal 43

⁴ M. Daulay, "*Analisis Keterkaitan Produktivitas Pertanian Dan Impor Beras Di Indonesia*," Jakarta: Pt Pustaka Indonesia, 2014 hal 88

perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, bidang industri makanan dan minuman, serta sektor distribusi merupakan pemeran utama dalam memastikan ketersediaan pangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁵

Di Indonesia tanaman padi merupakan tanaman pangan yang dibudidayakan petani, faktor utama yang mendorong tingginya konsumsi adalah jumlah penduduk yang besar, tambah lagi dengan semakin luasnya wilayah yang penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan utamanya. Selain itu tingginya konsumsi beras di Indonesia juga dikarenakan adanya budaya makan rakyat Indonesia yang merasa belum makan jika belum mengkonsumsi nasi, meskipun kebutuhan karbohidratnya sudah dipenuhi dari makanan lain.⁶

Beras merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai makanan pokok, beras memiliki kandungan gizi di antaranya yaitu protein, lemak, dan khususnya karbohidrat sebagai sumber energi yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, beras memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya konsumsi masyarakat di Indonesia salah satunya di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Konsumsi beras di wilayah ini cenderung sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan nasi merupakan makanan utama yang dibutuhkan oleh hampir seluruh rumah tangga di setiap lapisan masyarakat. Beras yang menjadi makanan pokok utama di Kota Batam masih sering menghadapi berbagai

⁵ *Ibid* hal 34

⁶ Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan." Bogor: Cakra Wisata 2017 hal 1-16.

kendala seperti distribusi yang tidak merata, gangguan cuaca ekstrem, serta perubahan harga beras di tingkat pasar menjadi tantangan yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap komoditas ini.

Masyarakat di Kota Batam yang sebagian besar menggantungkan kebutuhan pangannya pada beras turut meningkatkan tekanan terhadap produksi dan distribusi beras di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga beras menjadi salah satu tugas penting pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.⁷

Indonesia adalah satu dari banyak negara di dunia yang makanan pokoknya berupa nasi sehingga beras menjadi komoditas utama, untuk itu Indonesia mempunyai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan yaitu Perusahaan Umum Bulog atau disingkat Perum Bulog sebagai suatu lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Hal tersebut sesuai dengan tugasnya yang menyangkut harga beras, distribusi beras, dan pengelolaan stok beras untuk menjaga ketahanan pangan.

Peran Bulog diartikan pada suatu fungsi perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Peran Bulog yang dimaksud adalah mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya persepsi harga yang murah tidak selalu akan mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk beras, karena bagi kelompok konsumen tertentu persepsi harga yang murah berarti sama dengan kualitas yang rendah.⁸

⁷ Siddik, M., & Zaini, A, *“Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah sebagai Instrumen Stabilisasi Harga”* Jakarta: sinar grapika 2022 hal 76

⁸ *Ibid* hal 76

Masyarakat mengetahui bahwa kualitas beras komersial yang diperdagangkan oleh Bulog adalah jenis kualitas premium, maka sangat dimungkinkan persepsi konsumen tentang citra Bulog sebagai perusahaan milik negara bisa meningkat.

Harga menjadi variabel yang paling strategis karena menjadi indikator dalam tingkat keseimbangan antara penawaran dan permintaan serta menjadi acuan bagi konsumen dan produsen dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dipasar.⁹

Stabilisasi harga adalah suatu langkah untuk mendorong efisiensi keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Stabilisasi harga yang dimaksud adalah stabilisasi harga beras yang mana kita ketahui bahwasanya harga beras tidak banyak berubah, sangat berbeda sekali dengan bahan pangan lainnya yang selalu mengalami perubahan yang signifikan termasuk di Kota Batam dengan daerah kepulauan yang dikelilingi laut serta tidak adanya sawah untuk menanam padi seperti daerah lainnya yang ada di Indonesia, hal tersebut menjadi salah satu tantangan dilapangan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Selain karena faktor geografis tersebut, banyak hal yang menjadi tantangan dilapangan yang meliputi fluktuasi harga pasar dan infrastruktur distribusi yang belum memadai serta persaingan dengan pelaku swasta. Dalam beberapa kasus, harga beras tetap mengalami gejolak yang signifikan baik ditingkat produsen

⁹ Ade, *"Strategi Bauran Pemasaran Beras Dalam Perspektif Ekonomi Islam."* Jakarta:cipta media 2019 hal 60

maupun konsumen, sehingga menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan Bulog.

Bulog menerapkan kebijakan berupa penetapan harga dasar dan harga maksimum agar mencapai stabilitas harga beras. Kebijakan harga dasar bertujuan melindungi petani sebagai produsen dari penurunan harga gabah yang signifikan saat panen raya, sementara kebijakan harga maksimum dirancang untuk melindungi konsumen terutama dari kenaikan harga selama periode dimana ketersediaan pangan menurun secara drastis dan dapat menyebabkan kelaparan di wilayah yang terdampak atas ketidakstabilan harga tersebut.

Dari penjelasan serta latar belakang di atas maka saya mengangkat judul Proposal saya yaitu TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PERUM BULOG DALAM STABILISASI HARGA BERAS DI KOTA BATAM BERDASARKAN PRINSIP HUKUM PERDATA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Tinjauan yuridis terhadap peran Bulog dalam stabilisasi harga beras di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata ?
2. Bagaimanakah dampak dari tidak adanya kestabilan harga beras di pasar domestik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian pada proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap peran Bulog dalam satabilisasi harga beras di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis dampak dari tidak adanya kestabilan harga beras di pasar domestik.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian dapat memberikan manfaat seperti berikut :

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan, khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap peran Bulog dalam satabilisasi harga beras di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata.
2. Penelitian ini dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan dan menghubungkan dengan kejadian-kejadian di tengah masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap peran Bulog dalam satabilisasi harga beras di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian oleh siapapun sebelumnya baik di semua perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Berdasarkan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh

orang lain, kecuali yang tertulis didalam naskah dan disebutkan didalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat duplikasi serta ada pihak yang merasa dirugikan dengan skripsi ini, maka penulis akan bertanggung jawab serta menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Ahmad Miftah	Analisis efektivitas pelaksanaan operasi pasar beras Bulog terhadap stabilitas harga beras di pasar tradisional Kota Purwokerto	Objek penelitian yang berbeda dan kota penelitian juga berbeda
2.	Zefanya Susanto	Tata Kelola penjualan beras SPHP di Bulog	Perbedaannya pada analisis tata kelola penjualan beras SPHP di Bulog dan proses penyaluran
3.	Rabiatul adhwiyah	Strategi Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan	Pembahasan serta metode penelitiannya berbeda

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Proposal penelitian ini penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Pada judul proposal skripsi ini peran dari Bulog haruslah memiliki kepastian hukum sebagaimana dalam menstabilisasikan harga beras di pasar-pasar yang ada di Kota Batam agar masyarakat mendapatkan jaminan hukum yang baik dengan harga beras yang stabil dan menjaga stabilitas harga gabah dan beras di pasaran tersebut karena beras memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya konsumsi masyarakat di Kota Batam.

Dalam proses penelitian apabila dijumpai kesulitan untuk membentuk teori atau mencari teori agar dapat menyusun kerangka teoritis, maka ditempuh cara menyusun model-model teoritis.¹¹ Model tersebut sebenarnya merupakan simplikasi yang sistematis dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan. Model-model tersebut merupakan gambaran tentatif dari teori, membatasi batas-batas teori dan akan dapat memberikan kemampuan untuk memahami kerangka hubungan-hubungan antar variabel.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹² Soerjono Soekanto untuk menyusun kerangka teoritis maka seorang peneliti dapat menerapkan

¹⁰ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2012 hal 22

¹¹ *Ibid* hal 34

¹² M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju 20018 hal.80

metode induktif atau deduktif (bahkan kedua-duanya agar lengkap). Metode induksi merupakan cara yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan umum atas aspek-aspek yang sama pada hal-hal tersebut.¹³

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Sementara itu menurut Soerjono Soekanto untuk menyusun kerangka teoritis, maka seorang peneliti dapat menerapkan metode induktif atau deduktif (bahkan kedua-duanya agar lengkap), untuk kemudian menarik kesimpulan umum atas aspek-aspek yang sama pada hal-hal tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual digunakan untuk mempermudah rancangan penelitian, penulis menjabarkan secara jelas terkait dengan bahasa yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

- a. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁴
- b. Beras adalah biji-bijian (serealia) dari famili rumput-rumputan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press 2018 hlm.125

¹⁴ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Analisis, Bandung; Yrama Widya, 2019. hal. 16

(gramine) yang kaya akan karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok manusia, pakan ternak dan industri yang mempergunakan karbohidrat sebagai bahan baku. Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ini ditumbuk dengan alat tradisional lesung atau digiling sehingga bagian luarnya atau kulit dari gabah terlepas dari isinya. Dari bagian isi inilah terdapat warna putih, kemerahan, ungu, atau hitam, yang disebut beras.¹⁵ Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap beras akan menjadi masalah, jika ketersediaan beras sudah tidak dapat tercukupi.¹⁶ Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Komoditas ini dikatakan komoditas yang strategis karena dapat mempengaruhi seluruh kebijakan dalam suatu negara yang pangan pokoknya adalah beras. Regulasi terkait beras telah banyak mengalami perubahan karena kebijakan tentang beras selalu menyangkut harkat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Beras juga merupakan ukuran ketahanan pangan suatu bangsa.¹⁷

- c. Perusahaan Umum Bulog atau disingkat Perum Bulog sebagai suatu lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras.

¹⁵ Saidah, ‘ *Identifikasi Kualitas Beras Menggunakan Metode k-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine* ’ Jakarta: sinar media 2019 hal 56

¹⁶ Aido ‘ *Pola Konsumsi Dan Permintaan Beras Tingkat Rumah Tangga* ’ Kota Bandar Lampung: *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, 2021 hal 470–476.

¹⁷ Masyhuri ‘ *Pengaruh Pengadaan Beras Dan Operasi Pasar Terhadap Harga Beras Dalam Indonesia* ’ Surabaya : *Agro Ekonomi* 2016. hal 26

Hal tersebut sesuai dengan tugasnya yang menyangkut pada harga beras, distribusi beras, dan pengelolaan stok beras untuk menjaga ketahanan pangan. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan gabah dan beras dalam peraturan Presiden No 48 Tahun 2016 Tentang penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) serta dalam hal ini Bulog yang merupakan badan usaha milik pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967, yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Adapun Perum Bulog sendiri mempunyai visi: “menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan”.¹⁸

- d. Harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menukarkan berbagai kombinasi produk dan jasa, sehingga suatu harga harus berkaitan dengan berbagai macam barang dan akhirnya jasa tersebut akan sama dengan sesuatu yaitu produk.¹⁹
- e. Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan lonjakan harga. Operasi pasar dilakukan untuk menambah jumlah pasokan beras melalui penjualan, baik melalui pedagang besar, pengecer maupun penjualan langsung kepada konsumen tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan

¹⁸ P I Rumaratu, “Pengendalian Harga Beras Di Kota Manado Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara Dan Gorontalo,” Manado: Jurnal Eksekutif, no.1 2018, hal1

¹⁹ *Ibid* hal 76

mencegah terjadinya fluktuasi (turun naiknya harga) yang ekstrim.²⁰

- f. Harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk dan jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Sebagian besar konsumen bahkan mengidentifikasikan harga dengan nilai.²¹
- g. Hukum Perdata secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perdata. Hukum yaitu aturan, undang-undang ataupun norma, sedangkan perdata yaitu hubungan antara satu orang dengan yang lain. Hukum perdata dapat disebut sebagai hukum privat karena mengatur tentang orang, seperti misalnya tentang kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan harta benda, kegiatan usaha dan tindakan yang bersifat perdata lainnya.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian merupakan penelitian hukum yang mendasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian yuridis empiris itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

²⁰Mardah, ''*jurnal Peran Perum Bulog Dalam Stabilisasi Beras*'' . Kalimantan: Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Dosen-Dosen Universitas Islam, 2021 hal 1–7.

²¹ *Ibid* hal 121

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

data yang dilakukan melalui wawancara, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi lapangan. Ditinjau dari segi bentuknya penelitian ini adalah preskriptif, yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan mengenai masalah-masalah tertentu. Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa teori-teori, definisi, permasalahan, pembahasan, serta pengaturan yang berkaitan dengan hukum Perdata mengenai Tinjauan yuridis terhadap peran Perum Bulog dalam stabilisasi harga pasar di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata, jenis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Terseier

Selain bahan hukum primer dan sekunder yang telah disebutkan diatas, penelitian ini juga menggunakan bahab hukum tersier, seperti: kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan tujuan pemaparan penelitian prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan data adalah hasil dari penelitian lapangan ini merupakan jenis data primer. Penelitian lapangan dilakukan di Bulog Kantor Cabang Batam melalui metode wawancara dengan Bapak Adi Shatria, S.TP sebagai Asisten Manajer Pengadaan & Operasi untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen yang berasal dari kantor tersebut yang terkait dalam hal penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan bertujuan untuk memahamifenomena yang sedang terjadi dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan Kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang diperoleh secara tertulis ataulisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari objek penelitian yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang

terdiri dari 4 (empat) bab yang merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang berisikan pendahuluan, yang berisikan tentang uraian dan dasar dari penulisan yang dibuat yang meliputi: Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka, yang mengurai tentang pengertian tinjauan yuridis, Pengertian harga jenis harga di pasaran, tinjauan umum Bulog, Tinjauan mengenai stabilitas harga yang akan di bahas pada bab ini.

Bab III merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait judul dan rumusan masalah yang akan diuraikan penulis, yaitu mengenai Tinjauan yuridis terhadap peran Perum Bulog dalam satabilisasi harga pasar di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata dan dampak dari tidak adanya kestabilan harga beras di pasar domestik.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan tentang penutup berisi dari kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian yang di uraikan serta saran yang dapat di ambil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tinjauan Yuridis

Kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)²³. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum²⁴.

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut menurut objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, , Jakarta,:PT. Gramedia Pustaka Utama,2012 hal 1470,

²⁴ M. Marwan, ”*Kamus Hukum, Reality Publisher*”, Surabaya:Media Cipta , 2009, hal 651,

B. Tinjauan Umum Bulog

1. Pengertian Bulog

Bulog adalah perusahaan umum milik Negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

Sebagai lembaga yang ditugasi pemerintah melaksanakan kebijakan perberasan, peran Bulog masa depan sangat terkait dengan rumusan kebijakan yang ditetapkan. Pengalaman selama ini menunjukkan Bulog dapat menyesuaikan diri terhadap tugas yang diberikan karena jaringan logistiknya yang luas dan menyebar. Secara operasional, Bulog dapat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembelian gabah/beras atau pangan lain untuk keperluan melindungi petani atau keperluan lain.

Menyimpan beras atau pangan lain untuk keperluan cadangan pangan pemerintah di gudang-gudang Bulog dengan tujuan untuk memenuhi outlet mitra Bulog dan program penugasan pemerintah, atau cadangan beras yang ditujukan untuk keperluan insidentil seperti penanganan akibat bencana alam, pengungsi atau keadaan darurat lain. Jaringan yang ada juga dapat difungsikan membantu sistem logistik nasional bagi masyarakat dalam rangka distribusi atau perdagangan beras atau pangan. Sistem dan jaringan

yang dikembangkan saat ini cukup luas jangkauannya sampai ke desa-desa.

2. Sejarah Bulog

Perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995 keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran Bulog. Oleh karena itu, tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok Bulog sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai dan bahan pangan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta

memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijakan umum pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No.45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula.²⁵

Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam *Letter of Intent (LoI)*.

Dalam Keppres tersebut tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras, sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar.²⁶ Arah pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah-HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog

Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.²⁷

3. Visi dan Misi Bulog

Visi dan misi Perusahaan Umum Bulog adalah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

b. Misi

1. Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau.
2. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsip-prinsip GCG di bidang pangan.

4. Tujuan / Sasaran Bulog

Tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan

²⁷ Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan.²⁸

5. Tugas dan Peran Bulog

Tugas yang diberikan kepada Bulog berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Badan Urusan Logistik Pasal 2 menyatakan bahwa Bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Perum Bulog juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan dan pembinaan di bidang manajemen logistik sesuai kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Perencanaan di bidang operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan sumber daya manusia
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang operasi
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha jasa logistik
- e. Pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia

²⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog

- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Bulog
- g. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Bulog secara berdaya guna dan berhasil guna.²⁹

C. Tinjauan Umum Stabilisasi Harga

Stabilitas harga adalah suatu kondisi dimana harga suatu perekonomian tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Stabilitas keuangan adalah hal yang diinginkan semua negara pada umumnya.³⁰ Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa dan pemasaran produk/jasa, dalam banyak penerapannya disebut permintaan pasar.

Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi merupakan tujuan terpenting yang ingin dicapai pemerintah dalam makroekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan stabilitas harga. Harga yang stabil lebih mampu mengendalikan inflasi sehingga situasi makroekonomi negara tetap baik, inflasi dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Masyarakat cenderung merasa lebih aman apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik, karena stabilitas harga juga dapat mempengaruhi keadaan psikologis masyarakat itu sendiri, karena jika stabilitas harga terganggu akan membuat masyarakat menjadi panik. Oleh sebab itu kolaborasi harmonis antara masyarakat dan pemerintah akan sangat menentukan untuk terciptanya stabilitas harga.

²⁹ Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Badan Urusan Logistik, Pasal 2.

³⁰ *ibid*

D. Tinjauan Umum Pengawasan Stabilisasi Harga

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Prayudi Atmosudirdjo dalam Suriansyah pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu serta apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi antara apa yang telah direncanakan dengan pelaksanaan yang pada akhirnya dapat diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya. Sedangkan pakar manajemen M. Manullang dalam buku karya Suriansyah Murhaini menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi jika perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³¹

Menurut Siagian dalam buku karya Syamsir Torang mengatakan, bahwa pengawasan adalah proses pengamatan atas seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin hendaknya semua pekerjaan yang sedang dilakukan beroperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³²

Kemudian Robert J. Mokler mendefinisikan pengawasan sebagai berikut “Pengawasan manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan merancang

³¹ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014 hal 3.

³² Syamsir Torang, *Organisasi Dan Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2013,hal 176.

sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, menentukan dan mengukur kelengahan- kelengahan serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³³

Senada dengan pendapat di atas, pengawasan adalah fungsi manajemen yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian antara ketentuan yang ideal dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pengawasan bukan berfungsi untuk mencari siapa yang melakukan kesalahan, tetapi berfungsi untuk mencari apa yang salah dan dilakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan itu, namun jika sudah baik, maka dilakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas.

2. Fungsi – Fungsi Pengawasan

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat supaya mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan, agar tidak terjadi defisit yang tidak diinginkan.

³³ *ibid*

- d. Untuk memperbaiki penyimpangan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami kendala dan pemborosan-pemborosan.³⁴

3. Tujuan Pengawasan

Menurut Winardi dalam Murwaningsih menyebutkan bahwa pengawasan adalah membandingkan kejadian-kejadian dengan pengawasan yang sebelumnya telah dibuat. Mengadakan perbaikan yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan terjadi penyimpangan dari pada rencana-rencana. Dari pendapat di atas, Murwaningsih memberikan kesimpulan bahwa tujuan diadakannya pengawasan, antara lain :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan rencana tujuan utama adanya pengawasan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan rencana sudah sesuai atau belum. Rencana yang dibuat organisasi tentunya sudah dibuat semaksimal mungkin untuk mencapainya. Pencapaian tujuan organisasi menggunakan tahapan-tahapan, baik tahapan pendek, menengah atau panjang. Semua tahapan yang direncanakan perlu diawasi hasilnya. Apabila hasilnya kurang maksimal, maka harus dicari solusi yang paling tepat, sehingga organisasi dapat berjalan dan berkembang dengan baik.
- b. Untuk mengetahui kesulitan yang terjadi setiap aktivitas pasti ada risikonya, baik risiko yang positif maupun negatif. Kalau risiko yang positif pastilah tidak akan mengganggu jalannya organisasi. Akan tetapi risiko yang negatif seperti kesulitan-kesulitan yang dihadapi karyawan

³⁴ Effendi Usman, “*Asas-Asas Manajemen*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pera, 2015 hal 232.

maupun para manajer dalam menjalankan tugasnya perlu segera diketahui dan dicarikan solusinya. Dengan adanya pengawasan, organisasi dapat mengetahui kesulitan-kesulitan tersebut. Apabila terjadi peristiwa demikian, organisasi dapat mencari permasalahan yang timbul kemudian mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta mencari solusinya.

- c. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan. Ada pepatah, mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pepatah ini mengandung makna bahwa organisasi perlu pengadaan antisipasi terhadap gangguan-gangguan dalam mencapai tujuannya. Cara untuk mengatasi gangguan adalah dengan dilakukannya kegiatan pengawasan. Apabila dalam organisasi ada indikasi terjadinya hambatan, hasil pengawasan dapat segera ditindak lanjuti.
- d. Untuk mencari solusi apabila ada hambatan Pengawasan diberlakukan untuk mencari solusi apabila ada hambatan dalam pelaksanaan tugas. Tidak ada organisasi yang tidak mempunyai masalah. Setiap masalah yang muncul harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu jalannya organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi menjadi hal penting untuk mencari jalan keluar apabila ada permasalahan.³⁵

³⁵ Tri Murwaningsih, *''Perencanaan dan pengawasan''*, Surakarta: UNS Press Rosdayakarya, 2017, hal 76

4. Proses Pengawasan

- a. Menetapkan standar, artinya perencanaan merupakan rancangan untuk mengukur, secara logis hal ini berarti bahwa dalam proses pengawasan yang utama adalah menentukan standar.
- b. Mengukur kinerja atau melakukan perbaikan yang menyesuaikan berdasar pada tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Memperbaiki penyimpangan, pengawasan akan kurang jika dilakukan proses perbaikan terhadap tindakan kekeliruan tersebut.³⁶

5. Teknik Pelaksanaan Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum (*public opinion*) jenis apapun pekerjaan di dunia ini senantiasa memerlukan suatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga pekerjaan tersebut mampu diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan yang diharapkan. Berikut teknik-teknik pelaksanaan pengawasan beserta penjelasannya:

- a. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Teknik dalam pemantauan dalam pengawasan ini sangat dibutuhkan semua lembaga agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.³⁷
- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran atau

³⁶ Muhidin Wijaya Laksana, “*Managemen Pelayanan Publik*” Bandung : CV pustaka Setia, 2015, hal 12

³⁷ *ibid*

keterangan kebenaran yang jelas agar dapat pula memberikan keyakinan kepada semua pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan.

- c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa keutamaannya.
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Tujuan wawancara di bidang pengawasan dalam rangka mendapatkan informasi sehingga pengawasan dapat menentukan suatu keyakinan kebenaran atau kebenaran dalam kesalahan.
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Pengamatan dilakukan untuk menyesuaikan antara informasi dan kebenaran yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan, proses pengamatan harus dilakukan dengan cermat.
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Perhitungan sangat memegang penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan dari pada hasil pengawasan, kekeliruan dalam perhitungan berarti kesalahan hasil dalam pengawasan.
- g. Teknik analisis dalam pengawasan setiap data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil kerja yang dilakukan oleh unit kerja teknis sehingga dapat memberikan suatu kepastian.

- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan pengawasan kadang tidak informatif karena sulit dipahami oleh penerima laporan, oleh karena itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya.

E. Tinjauan Umum Harga

1. Pengertian Harga

Menurut Stanton harga adalah *Price is value expressed in terms of dollars and cents, or any other monetary medium of exchange* yang kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar Menurut Basu Swastha, Harga diartikan sebagai Jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.³⁸

Menurut menurut Alex S Nitisemito, Harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Dan harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran

³⁸ Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Liberty, 1990, hal 147.

yang lainnya.³⁹

Harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menukarkan berbagai kombinasi produk dan jasa, sehingga suatu harga harus berkaitan dengan berbagai macam barang dan akhirnya jasa tersebut akan sama dengan sesuatu yaitu produk, harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk dan jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Sebagian besar konsumen bahkan mengidentifikasikan harga dengan nilai. harga merupakan sejumlah uang (ditambah beberapa barang jika mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.

Harga adalah indikasi nilai suatu produk atau layanan, Ini adalah jumlah uang yang bersedia dibayarkan seseorang sebagai imbalan atas sesuatu. Semakin banyak manfaat yang diperoleh seseorang dari suatu barang atau jasa, semakin banyak uang yang bersedia mereka bayarkan untuk itu. Harga yang adil adalah harga yang tidak eksploitatif atau menindas salah satu pihak, dan menguntungkan kedua belah pihak secara setara.

2. Peranan Harga

Harga memiliki dua peranan utama yaitu :

³⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Adi Pustaka, 2001 hal 151.

2. Peranan alokasi. Alokasi memiliki peran penting dalam harga yang membantu pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki
3. Peranan Informasi. Informasi berperan dalam ‘mendidik’ konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.⁴⁰

3. Faktor yang mempengaruhi harga

Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Sujarweni (2015 :74), keputusan penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu:

1. Faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga yaitu sebagai berikut:
 - a) Tujuan Perusahaan. Tujuan perusahaan adalah tujuan atau target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan perusahaan dapat bervariasi

⁴⁰ *ibid*

tergantung pada jenis perusahaan dan industri yang bersangkutan.

- b) Strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran atau yang sering dikenal dengan istilah 4P (*Product, Price, Place, Promotion*) adalah pendekatan holistik yang digunakan oleh perusahaan untuk merancang dan mengelola kombinasi pemasaran yang efektif untuk produk atau layanan mereka. Penetapan strategi bauran pemasaran yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dalam mencapai target pasar, tersiar di benak pelanggan, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar.
- c) Biaya. Biaya merupakan jumlah uang yang dikeluarkan atau nilai tukar yang harus diberikan untuk mendapatkan atau menggunakan suatu barang atau jasa. Pemahaman dan manajemen biaya yang baik penting bagi perusahaan, karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, perencanaan keuangan, penetapan harga, pengelolaan operasional dan meningkatkan efisiensi serta profitabilitas perusahaan.
- d) Pertimbangan organisasi. Pertimbangan organisasi adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dan diprioritaskan oleh suatu organisasi dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Setiap organisasi dapat

memiliki pertimbangan yang lebih spesifik tergantung pada industri, ukuran dan lingkungan operasional mereka. Penting bagi organisasi untuk secara cermat mempertimbangkan aspek-aspek ini dan mencapai keseimbangan yang sesuai dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka.⁴¹

2). Faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga yaitu sebagai berikut:

a) Pasar dan permintaan. Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan pertukaran barang atau jasa. Permintaan adalah faktor penting dalam pasar karena hal ini menentukan sejauh mana konsumen bersedia untuk membeli produk atau jasa suatu perusahaan. Perusahaan harus secara terus-menerus memantau dan menganalisis permintaan pasar untuk memahami tren dan perubahan yang terjadi. Hal ini membantu mereka dalam menyesuaikan strategi pemasaran, mengidentifikasi peluang baru, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.

b) Biaya, harga dan penawaran barang

Biaya, harga, dan penawaran barang adalah konsep-konsep

⁴¹ Ade, “*Strategi Bauran Pemasaran Beras Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” Jakarta:cipta media 2019 hal 60

yang saling terkait dalam konteks bisnis. Ketiga konsep ini saling berhubungan. Biaya produksi berperan dalam menentukan harga yang dapat ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Namun, harga yang ditetapkan harus juga memperhatikan permintaan pasar dan tingkat persaingan. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, permintaan akan menurun dan penjualan dapat terpengaruh. Sebaliknya, jika harga ditetapkan terlalu rendah, perusahaan mungkin menghadapi kerugian atau tidak mampu memenuhi biaya produksi. Perusahaan perlu melakukan analisis yang cermat terkait biaya, harga, dan penawaran barang untuk mencapai titik yang tepat dalam mencapai margin keuntungan yang seimbang, memenuhi permintaan pasar, dan mencapai keunggulan kompetitif

c) Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian mengacu pada kondisi ekonomi yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah pada suatu waktu tertentu. Keadaan perekonomian dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penting bagi perusahaan dan masyarakat umum untuk memahami keadaan perekonomian karena hal ini dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, investasi, konsumsi, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan. Informasi tentang keadaan perekonomian juga dapat

membantu dalam perencanaan bisnis, strategi pemasaran, dan manajemen risiko ⁴²

4. Tujuan penetapan harga

Pada dasarnya terdapat enam tujuan penetapan harga, yaitu:

1. Kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya, jika mengalami kapasitas lebih, persaingan ketat, atau perubahan keinginan konsumen.
2. Laba maksimum. Banyak perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan labanya sekarang. Mereka memperkirakan bahwa permintaan dan biaya sehubungan sebagai alternatif harga dan memilih harga yang akan menghasilkan laba, arus kas, atau pengembalian investasi yang maksimum.
3. Pendapatan maksimum. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Maksimalisasi pendapatan hanya membutuhkan perkiraan fungsi permintaan.⁴³
4. Pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan lainnya ingin memkasimalkan unit penjualan. Mereka percaya bahwa volume penjualan yang lebih tinggi menghasilkan biaya perunit yang lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi.
5. *Skimming* pasar maksimum. *Skimming* pasar hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki

⁴² *ibid*

⁴³ Aliyah, ''Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan''. Jakarta: Cakra Wisata, 2017
hal 16

permintaan tinggi, biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidaklah sedemikian tinggi, sehingga dapat mengurangi keuntungan penetapan harga maksimal yang dapat diserap pasar, harga yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing, harga tinggi menyatakan citra produk superior.

6. Kepemimpinan mutu produk. Perusahaan mungkin mengarahkan untuk menjadi pemimpin dalam hal mutu produk di pasar, dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Mutu dan harga yang lebih tinggi akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata industrinya.⁴⁴

5. Strategi Penetapan Harga

Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar. Selain itu untuk mencegah timbulnya persaingan yang sengit. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga produk baru;⁴⁵

- a. *Skimming Pricing*, merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru, dengan dilengkapi aktifitas promosi yang gencar, tujuannya adalah :
 - i. Melayani pelanggan yang tidak terlalu sensitif terhadap harga, selagi pesaingannya belum ada.

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Guzman, "Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga pasar" Surabaya: *Economic Education* 2018 hal 301

- ii. Untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar.
 - iii. Untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga, karena akan lebih mudah menurunkan harga dari pada menaikkan harga awal.
- b. *Penetration Pricing*, merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi, dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Dengan harga rendah perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunkan biaya per-unit. Strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, dimana laba jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ada empat bentuk harga yang menggunakan strategi *Penetration Pricing*, antara lain :
- 1. Harga yang dikendalikan (*restrained price*), yaitu harga yang ditetapkan dengan tujuan mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi. Pengendalian harga adalah penetapan batas harga barang untuk menghindari kenaikan harga sehingga sesuai dengan daya beli rakyat dan biasanya dilakukan jika persediaan barang-barang sangat terbatas.
 - 2. *Elimination price*, yaitu merupakan penetapan harga pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan pesaing - pesaing tertentu (terutama yang kecil) keluar dari persaingan.

3. Promotion price adalah harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas sama, dengan tujuan untuk mempromosikan produk tertentu.
4. Keep-out price, merupakan penetapan harga tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing memasuki pasar.

F. Tinjauan Umum Beras

1. Pengertian Beras

Beras adalah biji-bijian (serealia) dari famili rumput-rumputan (gramine) yang kaya akan karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok manusia, pakan ternak dan industri yang mempergunakan karbohidrat sebagai bahan baku. Beras merupakan salah satu makanan pokok. Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ini ditumbuk dengan alat tradisional lesung atau digiling sehingga bagian luarnya atau kulit dari gabah terlepas dari isinya. Dari bagian isi inilah terdapat warna putih, kemerahan, ungu, atau hitam, yang disebut beras .

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap beras akan menjadi masalah, jika ketersediaan beras sudah tidak dapat tercukupi.

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Komoditas ini dikatakan komoditas yang strategis karena dapat mempengaruhi seluruh kebijakan dalam suatu negara yang pangan pokoknya adalah

beras. Regulasi terkait beras telah banyak mengalami perubahan karena kebijakan tentang beras selalu menyangkut harkat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Beras juga merupakan ukuran ketahanan pangan suatu bangsa.⁴⁶

2. Jenis – Jenis Beras

1. Beras Putih

Beras putih adalah padi yang sudah digiling dan bersih dari bekatul serta kulit arinya sehingga beras yang dihasilkan berwarna putih. Beras putih memiliki sifat pulen namun dari segi nutrisi zat gizinya lebih rendah daripada jenis beras yang lain.⁴⁷

2. Beras Cokelat

Beras coklat sebenarnya merupakan beras putih yang masih memiliki bekatul serta kulit ari. Bekatul dan 11 kulit ari memiliki banyak sekali nutrisi, vitamin, mineral dan juga serat. Beras coklat terkadang sering dianggap sebagai beras merah karena bentuk dan warnanya hampir sama.

3. Beras Merah

Beras merah mudah sekali dikenali dengan warnanya yang kemerahan. Warna merah tersebut berasal dari lapisan bekatul atau aleuron yang mengandung senyawa antosianin, yaitu suatu zat yang membuat beras ini berwarna merah.

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Ramadhan, ''Perdagangan dan Bisnis dalam Islam. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam'' Jakarta: Cipta Mandiri 2020,hal 19

4. Beras Hitam

Beras hitam merupakan beras yang langka. Beras hitam sering disebut *forbidden rice*. Beras hitam bukanlah beras ketan hitam, karena keduanya berbeda. Beras ini mengandung senyawa antosianin yang sangat tinggi, sehingga beras yang dihasilkan berwarna hitam atau keunguan. Beras hitam memiliki tekstur agak pera serta kurang cocok untuk dijadikan nasi. Beras hitam yang baik memiliki warna yang hitam mengkilat serta tidak banyak kutu.

5. Beras Ketan Putih

Beras ketan putih banyak digunakan sebagai bahan baku kue, cake, brownies, dan makanan kecil lainnya. Beras ketan putih berwarna putih, karena mengandung amilopektin yang sangat tinggi.

6. Beras Ketan Hitam Beras ketan hitam tidak memiliki sifat pulen seperti beras ketan putih. Beras ketan hitam umumnya memiliki tekstur agak pera. Sehingga beras ketan hitam sering dijadikan bahan campuran untuk tapai ketan, bubur ketan hitam maupun bahan baku kue tradisional .⁴⁸

3. Alur Pengadaan Beras

Dalam Negeri berawal dari produksi petani. Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), petani menjadi aman dalam melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya.

⁴⁸ *ibid*

Dengan “semangat” berproduksinya, produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi. Salah satu pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (availability) dapat tercapai

Petani dengan adanya HPP mempunyai perkiraan harga untuk melepas produksinya. Pilihan pasar yang terbuka antara Bulog dan pasar umum diharapkan akan memberikan daya tawar yang lebih baik bagi petani. Dengan HPP sebagai patokan harga jualnya, petani bisa memilih untuk menjual ke pasar umum atau ke Bulog. Dari sisi operasional Bulog, terdapat tiga saluran dalam penyerapan produksi petani yaitu Satgas, Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) dan Mitra Kerja. Ketiga saluran tersebut membeli gabah langsung pada petani dengan patokan HPP. Umumnya gabah yang dibeli adalah gabah pada kualitas apa adanya (di luar kualitas yang ada dalam Inpres). Sedangkan gabah yang diterima Bulog adalah Gabah Kering Giling (GKG) yaitu gabah dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa kotoran maksimum 3%. Kualitas ini cukup tahan disimpan dalam waktu tertentu dan siap digiling untuk menghasilkan beras standar pada saatnya. Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2009, harga GKG di tingkat penggilingan adalah Rp.3.300/kg dan di gudang Bulog Rp.3.345/kg. Satgas yang tidak memiliki sarana pengeringan maupun pengolahan dapat bekerjasama dengan UPGB atau Mitra Kerja melakukan pengolahan baik untuk mendapatkan GKG maupun beras standar. Dalam Inpres Nomor 7 tahun 2009

persyaratan kualitas beras yang diterima Bulog adalah beras dengan kadar air maksimal 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimal 95%. Beras dengan kualitas tersebut diterima Bulog dengan harga Rp.5.060/kg di gudang Bulog.⁴⁹

G. Tinjauan Umum Ketahanan Pangan

1. Pengertian ketahanan pangan

Pangan diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama warga Indonesia. Beras memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi pedesaan), lingkungan (menjaga tata guna air dan udara bersih) dan sosial politik (perekat bangsa, ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin.

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat disemua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat.

⁴⁹ *ibid*

2. Tujuan ketahanan pangan

Adapun yang menjadi tujuan program ketahanan pangan yang mencerminkan ketahanan pangan yang baik adalah sebagai berikut: ⁵⁰

- a) Meningkatnya ketersediaan pangan.
- b) Mengembangkan diversifikasi pangan.
- c) Mengembangkan kelembagaan pangan.
- d) Mengembangkan usaha pengelolaan pangan.

3. Sasaran ketahanan pangan

Sasaran yang ingin dicapai dari program ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a. tercapainya ketersediaan pangan di tingkat regional dan masyarakat yang cukup.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunkan ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi non beras.

4. Faktor Yang Menentukan Ketahanan Pangan

- a. Lahan Masalah

Lahan pertanian akibat konversi yang tidak bisa dibendung yang diakibatkan distribusi lahan yang timpang. Selain itu pertumbuhan penduduk di perdesaan akan hanya menambah jumlah petani gurem atau petani yang tidak memiliki lahan sendiri atau dengan lahan

⁵⁰ Ahmad Erani Yustika, ''Masalah Ketahanan Pangan''. Surabaya:Adi Cipta 2018 hal 66

yang sangat kecil yang tidak mungkin menghasilkan produksi yang optimal akan semakin banyak. Lahan pertanian yang semakin terbatas juga akan menaikkan harga jual atau sewa lahan, sehingga hanya sedikit petani yang mampu membeli atau menyewanya, dan akibatnya, kepincangan dalam distribusi lahan tambah besar.⁵¹

b. Infrastruktur

Bahwa lambannya pembangunan infrastruktur boleh jadi ikut berperan mengapa pertanian di Indonesia kurang kokoh dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur pertanian menjadi syarat penting guna mendukung pertanian yang maju.

c. Teknologi dan Sumber Daya Manusia

Teknologi dan sumber daya manusia (SDM), bukan hanya jumlah tetapi juga kualitas, sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan dapat dipastikan bahwa pemakaian teknologi dan input-input modern tidak akan menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam arti pengetahuan atau wawasannya mengenai teknologi pertanian, pemasaran, standar kualitas, dll. rendah. Lagipula, teknologi dan SDM adalah dua faktor produksi yang sifatnya komplementer, dan ini berlaku di semua sektor, termasuk pertanian.

⁵¹ *ibid*

d. Energi

Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak langsung. Jalur langsung adalah energi seperti listrik atau BBM yang digunakan oleh petani dalam kegiatan bertani, misalnya dalam menggunakan traktor. Sedangkan tidak langsung adalah energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik yang membuat input-input lainnya dan alat-alat transportasi dan komunikasi.

e. Dana Penyebab lainnya

yang membuat rapuhnya ketahanan pangan adalah keterbatasan dana. Diantara sektor-sektor ekonomi, pertanian yang selalu paling sedikit mendapat kredit dari perbankan (dan juga dana investasi) di Indonesia. Berdasarkan SP 2003, tercatat hanya sekitar 3,06% dari jumlah petani yang pernah mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya membiayai kegiatan bertani dengan menggunakan uang sendiri.

f. Lingkungan Fisik/Iklim

Tidak diragukan bahwa pemanasan global turut berperan dalam menyebabkan krisis pangan. Pertanian, terutama pertanian pangan, merupakan sektor yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, mengingat pertanian pangan di Indonesia masih sangat mengandalkan pada pertanian sawah yang berarti sangat memerlukan air yang tidak sedikit.⁵²

⁵² Sri Hartati Samhadi, *"Perubahan Iklim. Ketahanan Pangan Terancam"*, Jakarta: Global Media 2018 hal 55

g. Relasi Kerja

Relasi kerja akan menentukan proporsi nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada para pelaku ekonomi di pedesaan. Dalam kata lain, pola relasi kerja yang ada di sektor pertanian akan sangat menentukan apakah petani akan menikmati hasil pertaniannya atau tidak. Untuk mengidentifikasi bagaimana pola relasi kerja yang berlaku selama ini di Indonesia bisa dilakukan dengan memakai beberapa indikator, diantaranya nilai tukar petani (NTP).

h. Ketersediaan Input Lainnya

Terutama keterbatasan pupuk dan harganya yang meningkat terus merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan pertanian di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dilihat dari ketersediaan input lainnya. Walaupun niatnya jelas, namun dalam implementasi di lapangan, pemerintah selama ini kelihatan kurang konsisten dalam usahanya memenuhi pupuk bersubsidi untuk petani agar ketahanan pangan tidak terganggu. Tanpa ketersediaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk dalam jumlah memadai dan dengan kualitas baik dan relatif murah, sulit diharapkan petani, yang pada umumnya miskin, akan mampu meningkatkan produksi komoditas pertanian.

H. Tinjauan Umum Kota Batam

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat

Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Bareleng. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).⁵³

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama *BP Batam*), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.

Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam Di akses Pada hari senin 25 Mei 2026 pukul 23:35 WIB.

penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam).⁵⁴

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam).

Era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam)⁵⁵

⁵⁴ Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Pada 22 November 1973

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

BAB III

HASIL PENELITIAN

i. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Perum Bulog Dalam Stabilisasi Harga Beras Di Kota Batam Berdasarkan Prinsip Hukum Perdata

Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi merupakan tujuan terpenting yang ingin dicapai pemerintah. dalam makroekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan stabilitas harga. Harga yang stabil lebih mampu mengendalikan inflasi sehingga situasi makroekonomi negara tetap baik. Inflasi dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri, yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Masyarakat cenderung lebih damai karena kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik untuk menjaga stabilitas negara. Stabilitas harga juga mencerminkan keadaan psikologis masyarakat, karena kepanikan Masyarakat bisa dibeli. Kurangnya informasi dan pandangan umum yang negatif sekaligus menjadi penyebab terjadinya pembelian panik. Stabilitas harga merupakan hasil berbagai upaya yang dilakukan secara sinergis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Peran Bulog tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi. Dalam

perkembangan selanjutnya, peran Bulog tidak hanya terbatas pada beras saja tetapi juga pada pengendalian harga saat situasi harga meningkat.⁵⁶

Masalah beras cukup sensitif dan bukan hal yang sederhana sehingga dalam penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Oleh sebab itu pemerintah memberikan kewenangan kepada bulog untuk tetap menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas harga. Bulog dianggap kurang inovatif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengantisipasi perubahan pasar dan mempersiapkan strategi yang tepat untuk menjaga kestabilan harga pangan sedangkan Peran Bulog sebagai penjaga kestabilan harga pangan di Indonesia menjadi penting sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan.

Dalam menjaga stabilitas harga pangan yang seharusnya dijalankan oleh Perum Bulog yaitu, menjaga ketersediaan pangan dengan memastikan pasokan yang masuk cukup untuk memenuhi permintaan, kemudian menerapkan suatu mekanisme harga yang stabil untuk mencegah fluktuasi harga yang tajam, dan memastikan distribusi pangan yang efisien dan tepat waktu untuk terhindar dari kelangkaan pangan yang bisa menyebabkan tidak stabilnya harga.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2026 pukul 13:30 WIB di Kantor Bulog Cabang Batam peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Adi Shatria, S.TP yang menjabat sebagai Asisten

⁵⁶ Agus Saifullah, *"Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional,"* Jakarta:Cipta budaya 2001, hal 34.

⁵⁷ Anom Ali, *"Strategi Pengembangan Pemasaran Beras Perusahaan Umum (Perum) Bulog Di Kota Jambi,"* Media Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Ilmu Agribisnis April 2021 .

Manajer Pengadaan & Operasi di Kantor Bulog cabang Batam beliau menanggapi rumusan masalah pada skripsi ini ia mengatakan bahwa di Kota Batam sejauh ini harga beras di Kota Batam cenderung stabil dan tidak ada kenaikan secara signifikan.⁵⁸

Langkah awal yang akan di lakukan oleh Bulog jika terjadi kenaikan harga yaitu melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Operasi Pasar dengan menggelontorkan beras cadangan pemerintah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan melakukan penegakan hukum perdata dan pidana terhadap distributor yang menimbun atau menyelewengkan beras.⁵⁹

Bulog menjaga stabilisasi harga pada beras di Kota Batam tidak melulu dalam keadaan mulus tetapi ada kendala yang di hadapi oleh Bulog Cabang Kota Batam sejauh ini kendala yang berarti dalam mempertahankan harga beras cenderung minim, hanya saja khususnya di wilayah kepulauan ini terdapat kendala logistik dan geografis, kerumitan distribusi ke berbagai wilayah kepulauan dan pelosok daerah sering memicu hambatan, keterlambatan, atau biaya operasional yang tinggi tetapi kendala tersebut masih relatif wajar dan dapat teratasi.⁶⁰

Sepanjang tahun 2026 ini dan di tahun tahun sebelumnya stabilisasi harga beras di Kota Batam masih bisa di katakan cukup aman dan terjangkau walupun banyak daerah daerah kepulauan dan banyak pulau pulau kecil yang

⁵⁸ Hasil wawancara pada Jumat 5 mei 2026 pukul 13:30 WIB di Kantor Bulog cabang Batam

⁵⁹ Hasil wawancara pada Jumat 5 mei 2026 pukul 13:30 WIB di Kantor Bulog cabang Batam

⁶⁰ Hasil wawancara pada Jumat 5 mei 2026 pukul 13:30 WIB di Kantor Bulog cabang Batam

masih sangat sulit untuk di jangkau dalam proses pendistribusiannya tetapi masih bisa dijaga stabilisasi harga beras di kota Batam ini.⁶¹

Bulog dalam melaksanakan mandat publik (pengadaan dalam negeri, penyaluran beras bersubsidi, upaya stabilisasi harga, pengelolaan pasokan pangan pemerintah) telah menunjukkan manfaat yang sangat nyata, baik finansial maupun non finansial, dalam meningkatkan kesejahteraan petani., melindungi rumah tangga miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas politik dan sosial.⁶²

B. Dampak Dari Tidak Adanya Kestabilan Harga Beras Di Pasar Domestik

Bulog sebagai lembaga pemerintah yang mengemban tugas menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia, memiliki ragam strategi yang dijalankan untuk meredam gejolak harga dan pasokan bahan pangan pokok. Strategi-strategi tersebut meliputi pengendalian distribusi, operasi pasar, peningkatan cadangan pangan, kerja sama dengan instansi terkait, hingga penguatan infrastruktur logistik pertanian. Dengan menerapkan strategi secara komprehensif, diharapkan Bulog mampu menstabilkan harga, mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan.

Kebijakan Bulog yang merupakan pangan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia adalah beras. Pasalnya, beras merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan menjadi komoditas perekonomian konsekuensi ekonominya adalah ketika pendapatan meningkat,

⁶¹ Hasil wawancara pada Jumat 5 mei 2026 pukul 13:30 WIB di Kantor Bulog cabang Batam

⁶² *ibid*

permintaan akan kuantitas dan kualitas beras yang lebih baik juga meningkat. Kutipan Amin Priatna bahwa politik adalah alat untuk membersihkan hati atau memberikan harapan, inisiatif tersebut tetap dalam batas-batas politik dan justru mencerminkan status dan kekuasaan dalam organisasi yang dipercayakan kepada Bulog sejak tahun 2018 sebagai penjamin kesejahteraan nasional. pangan, cadangan beras negara. Untuk menstabilkan ketersediaan pasokan dan harga, pemerintah mempunyai pedoman stabilisasi harga untuk menentukan kebijakan harga.⁶³

Ketersediaan pangan dalam kualitas yang baik dan jumlah yang cukup (kuantitas) adalah jaminan atas kelangsungan hidup masyarakat. Apabila kebutuhan pangan tersebut terpenuhi maka akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan politik. Pangan bukan hal yang sederhana namun sangat sensitif sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara baik. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijakan pangan berdampak tidak hanya terhadap pangan nasional tetapi turut berdampak pada beragam aspek penunjang stabilitas negara lainnya.⁶⁴

Pendistribusian beras oleh Perum Bulog merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan pangan nasional di Indonesia. Beras sebagai bahan pangan pokok membutuhkan proses distribusi yang efisien dan efektif untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian beras ini sangat beragam dan meliputi berbagai aspek, dari infrastruktur hingga kebijakan yang

⁶³ *ibid*

⁶⁴ Azwar Karim, ''*Ekonomi Mikro Islami*'', Jakarta: IIIT Indonesia, 2002 hal 42.

mendukung. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi, kecepatan, dan kehandalan distribusi beras dari gudang penyimpanan hingga ke tangan konsumen akhir.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 5 Mei 2026 pukul 13:30 WIB Di Kantor Bulog Cabang Batam peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Adi Shatria, S.TP yang menjabat sebagai Asisten Manajer Pengadaan & Operasi di Kantor Bulog cabang Batam beliau menanggapi rumusan masalah pada skripsi ini, beliau mengatakan dampak kenaikan harga beras akan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, lonjakan inflasi, dan peningkatan beban ekonomi bagi konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, ini memicu kerawanan pangan dan perubahan pola konsumsi.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara pada Jumat 5 Mei 2026 pukul 13:30 WIB di Kantor Bulog Cabang Batam

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang sudah di sebutkan maka jelaslah Tinjauan yuridis terhadap peran Perum Bulog dalam satabilisasi harga pasar di Kota Batam berdasarkan prinsip hukum perdata dan dampak dari tidak adanya kestabilan harga beras di pasar domestik maka dari itu uraian-uraian dan penyajian data dari hasil pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Rumusan masalah satu

Langkah awal yang akan di lakukan oleh Bulog jika terjadi kenaikan harga yaitu melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Operasi Pasar dengan menggelontorkan beras cadangan pemerintah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan melakukan penegakan hukum perdata dan pidana terhadap distributor yang menimbun atau menyelewengkan beras, Sepanjang tahun 2026 ini dan di tahun tahun sebelumnya stabilisasi Harga beras di Kota Batam masih bisa di katakan cukup aman dan terjangkau walupun banyak daerah daerah kepulauan dan banyak pulau pulau kecil yang masih sangat sulit untuk di jangkau dalam proses pendistribusiannya tetapi masih bisa dijaga stabilisasi harga beras di Kota Batam ini.

b. Rumusan masalah kedua

Pada rumusan masalah kedua narasumber mengatakan dampak kenaikan harga beras akan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, lonjakan inflasi, dan peningkatan beban ekonomi. Bagi konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, ini memicu kerawanan pangan dan perubahan pola konsumsi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat untuk di renungkan oleh semua pihak, saran yang ingin di sampaikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam penetapan harga Bulog cabang Kota Batam sebaiknya dapat mempertimbangkan kembali serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta instansi terkait agar kebijakan harga pangan lebih sesuai dengan kondisi lapangan juga meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan harga pangan, serta melakukan evaluasi berkala.
- b. Sebaiknya pada pihak Bulog bisa mempertahankan harga beras yang masih cukup aman di kota Batam dan melakukan evaluasi perkembangan harga agar mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade, *"Strategi Bauran Pemasaran Beras Dalam Perspektif Ekonomi Islam."* Jakarta: cipta media 2019
- Agus Saifullah, *"Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional,"* Jakarta: Cipta budaya 2001
- Ahmad Erani Yustika, *"Masalah Ketahanan Pangan"*. Surabaya: Adi Cipta 2018
- Aliyah, *"Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan."* Bogor: Cakra Wisata 2017
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2012
- Azwar Karim, *"Ekonomi Mikro Islami"*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002
- Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Liberty, 1990
- Effendi Usman, *"Asas-Asas Manajemen"*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pera, 2015
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Adi Pustaka, 2001
- Guzman, *"Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga pasar"* Surabaya: Economic Education 2018
- Hilyatin, D. L *"Pengembangan Ekonomi Islam Lokal Sektor Pertanian Melalui Agrowisata"* Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga: Botania Garden (Bogar) 2020
- Masyhuri, *"Pengaruh Pengadaan Beras Dan Operasi Pasar Terhadap Harga Beras Dalam Indonesia"* Surabaya : Agro Ekonomi 2016.
- M. Daulay, *"Analisis Keterkaitan Produktivitas Pertanian Dan Impor Beras Di Indonesia,"* Jakarta: Pt Pustaka indonesia ,2014
- M. Marwan, *"Kamus Hukum, Reality Publisher"*, Surabaya: Media Cipta , 2009,
hal 651,
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju 2001

Muhidin Wijaya Laksana, *“Managemen Pelayanan Publik”* Bandung : CV pustaka Setia, 2015

Rachman, *“Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Paradigm and Dimensions of Indonesia’s Food Security Strategy. In Jejaring Administrasi Publik”* Jakarta:Pusaka Negara 2021

Ramadhan, *”Perdagangan dan Bisnis dalam Islam. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ”* Jakarta: Cipta Mandiri 2020

Siddik, M., & Zaini, A, *“Efektivitas Kebijakan Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah sebagai Instrumen Stabilisasi Harga”* Jakarta:sinar grapika 2022

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press 2018

Sri Hartati Samhadi, *”Perubahan Iklim. Ketahanan Pangan Terancam”*, Jakarta: Global Media 2018

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Analisis, Bandung; Yrama Widya, 2019.

Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Syamsir Torang, *Organisasi Dan Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2013

Tri Murwaningsih, *”Perencanaan dan pengawasan”*, Surakarta: UNS Press Rosdayakarya, 2017

B. Jurnal

Anom Ali, *“Strategi Pengembangan Pemasaran Beras Perusahaan Umum Perum) Bulog Di Kota Jambi,” Media Komunikasi Hasi Penelitian Bidang Ilmu Agribisnis* April 2021 .

Aido *“Pola Konsumsi Dan Permintaan Beras Tingkat Rumah Tangga”* Kota Bandar Lampung: *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis*, 2021

Mardah, *”jurnal Peran Perum Bulog Dalam Stabilisasi Beras”*. Kalimantan: Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Dosen-Dosen Universitas Islam, 202

P I Rumaratu, “*Pengendalian Harga Beras Di Kota Manado Oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara Dan Gorontalo,*” Manado: Jurnal Eksekutif,no.1 2018

Saidah, ‘*Identifikasi Kualitas Beras Menggunakan Metode k-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine*’ Jakarta:sinar media 2019

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta,:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012

D. Peraturan Undang-Undang

Undang -Undang Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Kita Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum Perum Bulog

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog

Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau

Batam Pada 22 November 1973

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Badan Urusan Logistik, Pasal 2.

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

Foto Saat Melakukan Wawancara Dengan Narasumber



Foto Bersama Narasumber

